

Inovasi Kebijakan

Sejumlah Daerah Terbukti Mampu Berantas Korupsi

Kompas, Senin, 2 Maret 2009 | 15:08 WIB

Yogyakarta, Kompas - Pemerintah daerah bisa melakukan berbagai inovasi kebijakan untuk mengurangi potensi korupsi di daerah masing-masing. Beberapa pemerintah di Indonesia sudah membuktikan hal itu.

Hal tersebut diungkapkan Wahyudi Kumorotomo, dosen Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, dalam simposium nasional bertema "2009 Tanpa Korupsi: Indonesia Bebas Korupsi Bukan Utopi", Sabtu (28/2) di Yogyakarta.

Menurut Wahyudi, saat ini cara berpikir dalam upaya mengurangi korupsi kebanyakan masih berfokus pada pemberantasan korupsi, belum pada pencegahan.

"Harus diakui, dalam situasi akutnya persoalan korupsi, pemberantasan korupsi melalui pendekatan hukum harus dilakukan untuk menimbulkan efek jera. Tetapi, harus diingat, upaya menangkal korupsi yang akan bertahan lama ialah pencegahan secara sistematis," ujarnya.

Wahyudi menuturkan, inovasi kebijakan yang dilakukan beberapa pemerintah daerah terbukti sangat efektif mencegah korupsi. Inovasi yang dilakukan itu bisa berbeda-beda. Faktor kepemimpinan memang peran kunci.

Ini, misalnya, yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat; Kebumen, Jawa Tengah; dan Kota Yogyakarta. Kabupaten Solok membentuk pelayanan satu pintu (yantupin) tahun 1996. Selain itu, kabupaten tersebut memangkas berbagai honorarium yang tidak terkait dengan peningkatan efektivitas pemerintahan. "Pemotongan honor itu menghasilkan dana cadangan Rp 14 miliar yang kemudian dialokasikan ke bidang-bidang produktif," tuturnya.

Pemkab Kebumen di bawah kepemimpinan Bupati Rustriningsih sejak 2007 membuat terobosan lelang umum terbuka untuk proyek-proyek daerah secara serentak di alun-alun kota. Lelang diumumkan terbuka melalui internet, media cetak, dan elektronik. "Lelang terbuka itu menghasilkan penghematan sebesar Rp 14,4 miliar atau sekitar 11 persen dari total nilai lelang tahun 2007," ujarnya. Lelang seperti itu juga pernah dilakukan Kabupaten Gorontalo.

Pemkot Yogyakarta juga melakukan terobosan membentuk unit pelayanan terpadu satu atap (UPTSA) ditunjang unit pelayanan informasi dan keluhan (UPIK) yang memungkinkan warga menyampaikan pengaduan melalui SMS. Keberhasilan Kota Yogyakarta didukung teknologi informasi dan komunikasi.

"Faktor yang dapat diandalkan mencegah korupsi di daerah adalah transparansi, kepemimpinan dan dukungan publik," kata Wahyudi.

Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM Zainal Arifin Mochtar mengatakan, pemberantasan korupsi sudah saatnya berpaling dari korupsi di birokrasi ke penyalahgunaan kewenangan negara (state capture corruption). Korupsi ini dilakukan dengan cara melahirkan

kebijakan-kebijakan yang merugikan negara, namun menguntungkan pihak-pihak tertentu. "Dari korupsi jenis ini, kerugian bagi negara sangat besar," ujarnya. (RWN) " Pemberantasan korupsi sudah saatnya berpaling dari korupsi di birokrasi ke penyalahgunaan kewenangan negara(state capture corruption). Korupsi ini dilakukan dengan cara melahirkan kebijakan- kebijakan yang merugikan negara, namun menguntungkan pihak-pihak tertentu. *Zaenal Arifin Mochtar*